

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi telah melanda berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam bidang perekonomian. Hal ini membawa dampak yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, salah satu contohnya adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomis dan sosial. Utilitas adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan kepuasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan transportasi merupakan suatu instrumen yang digerakan oleh manusia atau mesin yang berguna untuk pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain.

Sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi merupakan perusahaan-perusahaan yang mengalami perkembangan pesat beberapa tahun terakhir. Pembangunan secara besar-besaran yang dijanjikan oleh pemerintah membuat investor melirik sektor ini untuk melakukan investasi. Besarnya dana yang digelontarkan dalam pembangunan infrastruktur, utilitas dan transportasi menjadi suatu indikator bahwa suatu negara sangat berdedikasi dalam memberikan fasilitas terbaik bagi warga negaranya. Banyaknya investor yang melirik sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi membuat perusahaan ini harus mampu

mengelola keuangan dengan baik, itu artinya perusahaan harus mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan perpajakan. Dimana didalam PSAK diatur berbagai kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan didalam peraturan perpajakan diatur penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan disebut laporan keuangan fiskus.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan pada periode tertentu kepada para pemegang saham. Namun, penyampaian informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pemegang saham sering kali tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sering kali manajemen perusahaan berkeinginan untuk menaikkan laba yang dilaporkan kepada pemegang saham dan pemakai eksternal lainnya supaya laporan keuangan tersebut terlihat baik.

Laba perusahaan masih sangat diperhitungkan sebagai informasi yang penting bagi investor, kreditor, dan pemilik perusahaan. Karena laba merupakan suatu ukuran untuk mengestimasi resiko dalam investasi dan kredit. Kemudian laba perusahaan sebagai target rekayasa bagi pihak manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya. Dengan memilih kebijakan tertentu, pihak manajemen sebagai pelaksana dan penanggung jawab operasional dalam perusahaan dapat menaikkan dan menurunkan laba sesuai dengan keinginannya.

Tindakan manajemen dalam memanipulasi informasi keuangan dengan menaikkan atau menurunkan laba menunjukkan adanya praktik manajemen laba pada perusahaan. Menurut Davidson, Stickney dan Weil dalam Sulistyanto. (2008), manajemen laba merupakan salah satu proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang akan dilaporkan.

Manajemen laba dapat dilakukan dengan praktik perataan laba (*income smoothing*), *taking a bath* dan penaikan laba (*income maximization*)(Scoot, 2000). Mulford (2010) menyatakan bahwa untuk dapat menilai baik buruknya manajemen laba tergantung pada sifat langkah-langkah manajemen laba yang dilakukan dan tujuan dari manajemen tersebut. Langkah-langkah manajemen laba bisa berada dalam rentang mulai dari yang paling hati-hati dengan menggunakan fleksibilitas dalam batasan SAK, menggunakan fleksibilitas yang hampir diluar SAK dan sampai pada melanggar SAK dengan membuat laporan keuangan bermuatan kecurangan.

Ada beberapa pendapat mengenai manajemen laba yang dikemukakan oleh akademisi, yaitu manajemen laba dikatakan baik jika masih dalam batasan aturan SAK dan diungkapkan secara penuh mengenai dampaknya terhadap kinerja keuangan tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Sedangkan manajemen laba dikatakan buruk jika menyajikan kinerja keuangan yang menyesatkan pembacanya dengan tidak mengungkapkan seluruhnya maupun sebagian mengenai dampaknya terhadap kinerja keuangan dan biasanya dilakukan secara sembunyi.

Praktik manajemen laba tersebut diperkuat dengan adanya fenomena yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar seperti pada PT Garuda Indonesia Tbk. Pada tahun buku 2018 penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) nomor 23. Dimana didalam laporan keuangan tersebut mencatat pendapatan yang masih berbentuk piutang, yang berasal dari transaksi perjanjian kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia. Kerja sama pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar US\$ 239.940.00 atau sekitar Rp 2,98 triliun dari PT Mahata.

Dari pengakuan pendapatan tersebut PT Garuda Indonesia Tbk meraih laba bersih US\$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar dan dari pengakuan pendapatan tersebut menimbulkan kerancauan dan menyesatkan karena keuangan PT Garuda Indonesia Tbk berubah dari yang sebelumnya rugi sebesar US\$ 216,58 juta menjadi untung US\$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar. Padahal jika nominal kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka PT Garuda Indonesia Tbk sebenarnya masih merugi US\$ 244,96 juta. Selain itu, catatan tersebut membuat beban yang ditanggung PT Garuda Indonesia Tbk menjadi lebih besar untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, beban itu seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerjasama dengan Mahata belum masuk ke kantong perusahaan.

Dari fenomena mengenai manajemen laba diatas dapat disimpulkan, bahwa manajemen sering kali memanipulasi laporan keuangan agar terlihat baik oleh pihak eksternal dimana perusahaan yang memiliki laba kecil direkayasa menjadi lebih besar agar terlihat baik oleh pihak eksternal. Sebaliknya perusahaan yang memiliki laba besar direkayasa menjadi kecil agar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi seminimal mungkin.

Kemudian ada dua faktor yang mempengaruhi adanya praktik manajemen laba, yang pertama adalah beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi yang disusun berdasarkan SAK dengan laba fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Sumomba, 2010). Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk memprediksi adanya praktik manajemen laba oleh manajemen dengan tujuan untuk menghindari kerugian pada perusahaan.

Pengakuan pajak tangguhan dapat mengakibatkan bertambah dan berkurangnya laba bersih karena adanya pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan. Pengakuan aktiva dan pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pembayaran pajak pada periode mendatang jadi lebih besar atau lebih kecil. Hal ini menjadi celah bagi manajemen untuk memanipulasi jumlah dari laba bersihnya sehingga bisa memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar (Djamaluddin, 2008). Suatu beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena beban pajak tangguhan dapat menurunkan tingkat laba dalam perusahaan, karena semakin tinggi beban pajak yang ditanggung maka semakin kecil pula laba yang didapat.

Adanya beban pajak tangguhan dalam sebuah perusahaan diperkuat dengan adanya fenomena yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar seperti pada PT PLN (PERSERO) Distribusi Bali. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak, didapatkan hasil yang berupa pajak penghasilan fiskal pada tahun 2003 sebesar Rp 616.206.533.565 dan pada Tahun 2004 sebesar Rp 120.344.177.465. Pajak tangguhan yang ada di PT PLN Distribusi Bali untuk aktiva pajak tangguhan tahun 2003 Rp 184.861.966.070 dan kewajiban pajak tangguhan Tahun 2003 sebesar Rp 65.002.051.320. Tahun 2004 aktiva pajak tangguhan sebesar Rp 36.103.253.240 dan kewajiban pajak tangguhan Tahun 2004 sebesar Rp 37.515.162.581.

Pada saat diadakan koreksi fiskal atas laporan laba rugi Tahun 2003 ditemukan adanya selisih sebesar Rp 57.366.518.744 lebih besar menurut fiskal dari pada laporan keuangan perusahaan. Pada Tahun 2004 juga ditemukan selisih yang lebih besar menurut fiskal dari pada laporan keuangan perusahaan sebesar Rp 48.766.124.690, pada laporan keuangan PT PLN (PERSERO).

Dari fenomena mengenai beban pajak tangguhan diatas dapat disimpulkan, bahwa pajak tangguhan dan aktiva tangguhan dapat dijadikan celah oleh manajemen untuk mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang sebenarnya dibayarkan atau perekayasaan dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, karena semakin besar pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan maka tingkat laba yang diperoleh perusahaan akan semakin kecil, sebaliknya jika pajak yang harus ditanggung perusahaan kecil maka tingkat laba yang diperoleh perusahaan akan semakin besar.

Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi adanya praktik manajemen laba adalah perencanaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber yang penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan negara. Salah satu sumber pajak besar yang diperoleh negara adalah dari pajak penghasilan. Pajak bagi perusahaan menjadi salah satu biaya yang menjadi fokus perhatian. Para manajer berusaha untuk mencari celah-celah peraturan perpajakan untuk mendapatkan manfaat guna membayar jumlah pajak yang lebih kecil kepada pemerintah. Dengan membayar pajak yang kecil, perusahaan akan memiliki kas yang lebih banyak untuk membiayai operasi dan ekspansi serta membuka lowongan kerja baru (Kieso, 2008:1).

Perencanaan pajak merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak guna memperkirakan besarnya pajak yang harus dibayarkan serta cara-cara yang dilakukan untuk memperkecil pajak. Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisir usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin (Suandy, 2008). Tujuan dari perencanaan pajak tersebut adalah untuk mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah melalui apa yang biasa disebut sebagai penghindaran pajak yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak.

Adanya perencanaan pajak didukung dengan adanya fenomena yang muncul, yang pertama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) meminta emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkatkan kepatuhan

pembayaran pajaknya. Pasalnya, tunggakan pajak perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa (PMB) tahun ini mencapai Rp94,4 triliun. Emiten-emiten ini merupakan wajib pajak besar, yang juga penunggak pajak besar. Tunggakannya mencapai Rp94,4 triliun, tutur Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

Selain itu, emiten juga kerap melakukan perencanaan (*tax planning*) untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Perencanaan pajak sendiri merupakan tindakan legal namun jika terlalu agresif bisa menjadi ilegal. Mereka memanfaatkan aturan yang ada sehingga pajak menjadi nihil atau kecil sama sekali. Misalnya, perusahaan ritel dapat keuntungan 10 persen dengan *tax planning* mereka bisa catat keuntungan jadi 0,1 persen. Perencanaan pajak secara agresif bisa diketahui dengan menggunakan data pembandingan (*benchmark*) perusahaan sejenis di industri yang sama. Misalnya perusahaan bergabung di industri sawit keuntungannya 15 persen itu jadi *benchmark*. Kalau satu perusahaan sawit keuntungannya hanya 1 persen itu ada *agressive tax planning*.

Kemudian fenomena selanjutnya terjadi di perusahaan-perusahaan besar seperti pada PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang ada di Singapura. Dari hasil laporan investigasi yang diterbitkan oleh LSM Internasional Global Witness mengindikasikan bahwa PT Adaro Energy Tbk melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia.

Menurut Global Witness cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang ada di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan PT Adaro Energy Tbk mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun.

Dari fenomena mengenai perencanaan pajak diatas dapat disimpulkan, bahwa fenomena perencanaan pajak masih dilakukan untuk meminimalkan pajaknya sekecil mungkin untuk memperoleh laba yang tinggi. Sementara untuk menekan pembayaran pajak seoptimal mungkin, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik terhadap dimensi-dimensi yang mempengaruhinya.

Berikut ini penulis sajikan tiga penelitian terdahulu mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba, yang pertama penelitian A.A Gede Raka Plasa Negara (2017). Universitas Udayana, mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba, penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 38 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *non probability* sampling, khususnya *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan metode regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan

beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba.

Penelitian kedua oleh Lusiana Kanji, (2019), STIEM Bongaya Makassar mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba, penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan 2013-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data berdasarkan laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari Galeri Investasi STIEM Bongaya Makassar. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* dan metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak dan pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian ketiga oleh Reza Hangga Dewa Kumala Putra (2019), Universitas Pakuan mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2013-2017. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda, pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh laporan keuangan dari (www.idx.co.id). Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa secara parsial perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan juga memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, secara simultan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bisa disimpulkan terdapat perbedaan hasil diantara peneliti, mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba, yang pertama A.A Gede Raka Plasa Negara, hasilnya perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan juga berpengaruh positif terhadap manajemen laba, berbeda dengan penelitian Lusiana Kanji yang hasilnya perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan juga beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian dari Reza Hangga Dewa Kumala Putra hasilnya secara parsial perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dan beban pajak tangguhan juga memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan secara simultan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan yaitu, dalam masalah perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan manajemen laba.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis seperti apa pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat menempuh ujian tingkat sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Bandung.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan dalam hal pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang praktik manajemen laba yang ada di berbagai perusahaan.

d. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan referensi perpustakaan Universitas Islam Bandung (UNISBA). khususnya jurusan Akuntansi, dan untuk membantu penelitian berikutnya yang akan membahas tentang permasalahan yang sama.